



# Dewan Sayangkan Siak IV Terhenti

Pekanbaru (HR)-Komisi C DPRD Riau yang membidangi infrastruktur menyayangkan Jembatan Siak IV terhenti sementara dan tidak bisa lebih cepat dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini karena Gubernur Riau ingin proyek jembatan diaudit terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI.

"Sangat disayangkan uang sudah masuk Rp370 miliar di Jembatan Siak IV, tapi tak bisa dimanfaatkan masyarakat. Sama saja artinya menaruh uang di dalam lubang jadinya," kata Ketua Komisi C DPRD Riau, Aziz Zaenal, Rabu (6/8).

Ia menjelaskan, Gubernur Riau Annas Maamun menyarankan Jembatan "Single Pylon" itu untuk diaudit dulu karena dinilai kemahalan. Tidak seperti Jembatan Padamaran di Kabupaten Rokan Hilir yang lebih panjang, tapi lebih

murah anggarannya.

Jembatan itu sudah menghabiskan dana Rp370 miliar dari total anggaran semuanya Rp456 miliar, hanya tinggal kurang lebih Rp70 miliar lagi," ujarnya.

Menurutnya dengan Rp70 miliar sisa, jembatan itu bisa fungsional, tapi Gubernur tidak mau karena diduga ada penyimpangan dan penggelembungan dana. Ia mengaku telah mengusulkan agar audit tetap dilakukan tapi pembangunan lanjutan tetap jalan juga.

"Saya sudah usulkan

tapi tetap tidak mau, audit BPK itu berbulan-bulan, makanya nanti hanya dimasukkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni 2015 dan tidak masuk di APBD Perubahan sekarang ini," ucapnya.

Secara fungsional, sambungnya, bisa saja bentangan utama yang saat ini belum siap dicor saja terlebih dulu, tanpa harus ada lampu dan asesoris sehingga sudah bisa digunakan oleh masyarakat.

Terkait adanya penyelewengan, ia mengatakan bahwa DPRD hanya terlibat secara politis yakni dalam hal kebijakan dan tidak secara teknis di mana seutuhnya dilakukan oleh eksekutif. Perkara nanti ada penggelembungan biaya, ia mengatakan orang yang membuat anggaran itulah yang dikenai sanksi.

**Dewan... 15**

## Dewan. Dari Hal. 9

ANGGOTA Komisi C DPRD Riau, Koko Iskandar mengatakan, untuk saat ini proyek jembatan tersebut memang tidak akan bisa masuk dalam APBD Perubahan mengingat adanya prosedur pengerjaannya.

"Kalau sudah terhenti sejak awal tahun lalu, tentu untuk memulainya harus menjalani proses tender dulu, belum lagi konsultannya. Jadi jika melihat waktu, memang tidak bisa dianggarkan dalam APBD Perubahan," ulasnya. (ant)